

Ekonomi Kerajaan Allah: Eksegesis 1 Timotius 6:6–10 dan Praktik Ekonomi Komunitas Gereja Perdana untuk Keadilan Distributif Kontemporer

Veronika A. Naibaho¹, Johannis Siahaya²

¹Sekolah Tinggi Teologi IKAT, Jakarta

²Sekolah Tinggi Agama Kristen Teruna Bhakti, Yogyakarta

Correspondence: veronikanaibaho@sttikat.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.46929/graciadeo.v7i1.205>

Abstract: This article examines the concept of the "economy of the Kingdom of God" through an exegesis of 1 Timothy 6:6–10 and the economic practices of the early church community, using them as a theological foundation for contemporary distributive justice. Employing a historical-grammatical exegetical approach combined with socio-historical analysis, this study identifies the meaning of ἀὐτάρκεια (*autarkeia*) as theological sufficiency distinct from Stoic idealism and explores how the early Christian community structurally practiced economic redistribution. Findings indicate that the text offers not merely an individual moral warning but an alternative economic architecture grounded in koinonia. Practical implications for the contemporary Indonesian church include developing models of structural diakonia, transparent congregational financial governance, and church engagement in social justice advocacy. This study fills a gap in the literature by integrating exegesis of the Pastoral Epistles with the contextual economics of the Indonesian church.

Keywords: 1 Timothy 6:6–10; *autarkeia*; distributive justice; early church; economy of God's kingdom

Abstrak: Artikel ini mengkaji konsep "ekonomi Kerajaan Allah" melalui eksegesis 1 Timotius 6:6–10 dan praktik ekonomi komunitas gereja perdana sebagai dasar teologis bagi keadilan distributif kontemporer. Menggunakan pendekatan eksegesis historis-gramatikal dan analisis sosio-historis, penelitian ini mengidentifikasi makna ἀὐτάρκεια (*autarkeia*) sebagai kecukupan teologis yang berbeda dari idealisme Stoa, serta mengeksplorasi bagaimana komunitas Kristen mula-mula mempraktikkan redistribusi ekonomi secara struktural. Temuan menunjukkan bahwa teks ini tidak sekadar memberikan peringatan moral individual, melainkan menawarkan arsitektur ekonomi alternatif berbasis koinonia. Implikasi praktis bagi gereja Indonesia kontemporer mencakup pengembangan model diakonia struktural, pengelolaan keuangan jemaat yang transparan, serta keterlibatan gereja dalam advokasi keadilan sosial. Penelitian ini mengisi kesenjangan literatur yang jarang mengintegrasikan eksegesis Surat-surat Pastoral dengan ekonomi gereja dalam konteks Indonesia.

Kata kunci: 1 Timotius 6:6–10; *autarkeia*; ekonomi kerajaan Allah; gereja perdana; keadilan distributif

PENDAHULUAN

Kemiskinan struktural dan ketimpangan ekonomi merupakan dua realitas yang terus membayangi kehidupan masyarakat Indonesia di era kontemporer. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa koefisien Gini Indonesia masih berada pada angka yang mencerminkan ketimpangan yang signifikan, sementara gereja sebagai institusi yang mengklaim misi transformatif sering kali lebih berperan sebagai pengamat ketimbang

sebagai agen perubahan. Ironisnya, banyak komunitas gereja justru mereproduksi logika kapitalisme pasar dalam pengelolaan keuangan jemaat, sehingga kehilangan dimensi kenabian yang seharusnya menjadi esensi kehadiran Kristus di ruang publik. Persoalan inilah yang mendorong perlunya refleksi teologis-biblika yang serius tentang bagaimana Kitab Suci, khususnya surat-surat pastoral, merumuskan relasi antara iman dan ekonomi.

Surat Pertama kepada Timotius, khususnya perikop 6:6–10, menawarkan salah satu rumusan paling kompak dan provokatif dalam Perjanjian Baru mengenai relasi antara kesalehan, kecukupan, dan keinginan untuk menjadi kaya. Teks ini sering disalahpahami sebagai nasihat asketis individual yang mengarahkan orang Kristen untuk menjauhi kekayaan materi. Namun, pembacaan eksegesis yang cermat, dengan mempertimbangkan konteks retorik, semantik Yunani, dan latar sosio-historis abad pertama, membuka dimensi yang jauh lebih kaya: bahwa Paulus sesungguhnya sedang merumuskan tatanan ekonomi alternatif yang berlandaskan pada logika Kerajaan Allah.¹

Komunitas gereja perdana, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul 2:42–47 dan 4:32–37, serta didukung oleh kesaksian para Bapa Gereja, bukan sekadar komunitas ibadah, melainkan juga komunitas ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip redistributif yang radikal. Praktik berbagi harta, pemeliharaan janda dan yatim, serta pengumpulan dana untuk gereja-gereja yang miskin merupakan ekspresi konkret dari apa yang dapat disebut "ekonomi koinonia." Pemahaman atas praktik-praktik ini menjadi penting ketika kita mencoba membangun teologi ekonomi yang relevan bagi gereja kontemporer.²

Kajian teologis-biblika mengenai kekayaan dan kemiskinan memang telah banyak dilakukan, termasuk dalam tradisi teologi evangelikal. Namun, secara spesifik, sangat sedikit kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan eksegesis Surat-Surat Pastoral dengan analisis praktik ekonomi komunitas gereja mula-mula dalam kerangka keadilan distributif kontemporer, khususnya dalam konteks Indonesia. Sebagian besar kajian yang ada berhenti pada tataran normatif-deskriptif tanpa menyediakan jembatan hermeneutis yang memadai dari teks ke konteks. Kesenjangan inilah yang menjadi titik awal penelitian ini.³

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu paradigma teologis yang disebut "ekonomi Kerajaan Allah" dengan cara: pertama, melakukan eksegesis historis-gramatikal terhadap 1 Timotius 6:6–10 untuk mengungkap makna teologis dan ekonomisnya secara utuh; kedua, menganalisis praktik ekonomi komunitas gereja perdana sebagai ekspresi konkret dari paradigma tersebut; dan ketiga, mengonstruksi implikasi-implikasi bagi praktik keadilan distributif dalam gereja Indonesia kontemporer. Tujuan ini merespons seruan para teolog seperti Miroslav Volf, yang menegaskan bahwa gereja dipanggil untuk tidak hanya mengkhhotbahkan Injil keselamatan, tetapi juga menjadi prasakramen keadilan Allah di dalam dunia.⁴

¹ Philip Towner, *The Letters to Timothy and Titus*, New International Commentary on the New Testament (Grand Rapids: Eerdmans, 2006), 395. DOI: 10.2307/3151001

² Justo L. González, *Faith and Wealth: A History of Early Christian Ideas on the Origin, Significance, and Use of Money* (San Francisco: Harper & Row, 1990), 23–25.

³ Bakhoh Jatmiko and Desi Erlina Zega, "Etika Keuangan Hamba Tuhan: Kajian Eksegetikal Terhadap 1 Timotius 6: 3-10," *Integritas: Jurnal Teologi* 3, no. 2 (2021): 133-147.

⁴ Yogi Hamonangan Sinurat and Robertus Septiandry, "Eksistensi Gereja Sinodal Sebagai Sakramen Keselamatan Universal," *Rajawali* (2023): 34-43.

Argumen utama artikel ini adalah bahwa 1 Timotius 6:6–10, dalam konteks holistiknya, bukan sekadar nasihat etis individual, melainkan menyandang muatan teopolitik yang signifikan: teks ini memanggil komunitas beriman untuk mengadopsi suatu tatanan ekonomi yang berorientasi pada kecukupan (*autarkeia*), bukan akumulasi; pada solidaritas, bukan persaingan; dan pada transendensi nilai, bukan subordinasi segalanya pada logika uang. Tatanan inilah yang, ketika diimplementasikan secara struktural oleh gereja, dapat menjadi kontribusi kenabian gereja bagi keadilan distributif di Indonesia.⁵

Artikel ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: setelah bagian pendahuluan dan metodologi, penulis akan menyajikan 4 pembahasan utama. Pertama, analisis semantik dan eksegesis kontekstual 1 Timotius 6:6–10 yang mengurai makna ἀὐτάρκεια dalam horizon teologis Pauline. Kedua, rekonstruksi sosio-historis praktik ekonomi komunitas gereja perdana sebagai ekspresi teologi *koinonia*. Ketiga, konstruksi teologis "ekonomi Kerajaan Allah" sebagai paradigma alternatif. Keempat, relevansi dan implikasi paradigma ini bagi keadilan distributif dalam konteks gereja Indonesia kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode eksegesis historis-gramatikal sebagai tulang punggung analisis teks, serta dilengkapi dengan analisis sosio-historis dan hermeneutis kontekstual. Eksegesis historis-gramatikal diterapkan untuk mengurai kata-kata kunci Yunani dalam 1 Timotius 6:6–10, termasuk ἀὐτάρκεια (*autarkeia*), εὐσέβεια (*eusebeia*), dan φιλαργυρία (*philargyria*), dengan merujuk pada leksikon standar seperti BDAG (Bauer-Danker-Arndt-Gingrich) dan Louw-Nida, serta komentar biblika yang diakui secara akademik dari tradisi evangelikal dan ekumenis. Metode ini memastikan bahwa interpretasi teologis dibangun di atas fondasi linguistik yang kokoh, bukan proyeksi anachronistis dari kerangka konseptual modern.⁶

Analisis sosiohistoris digunakan untuk merekonstruksi konteks komunitas gereja perdana, khususnya yang berkaitan dengan praktik ekonomi mereka pada abad pertama hingga ketiga Masehi. Sumber-sumber yang dikonsultasikan mencakup tulisan-tulisan Bapa Gereja, dokumen arkeologis, serta studi sejarah sosial Kekristenan pada masa awal. Sintesis antara temuan eksegesis dan rekonstruksi historis kemudian diartikulasikan melalui pendekatan hermeneutik spiral, bergerak dari teks ke konteks dan kembali ke teks, untuk menghasilkan implikasi teologis yang tidak kehilangan integritas biblikal maupun relevansi kontekstual bagi Indonesia. Validitas argumentasi dijaga melalui triangulasi sumber-sumber primer dan sekunder yang dapat diverifikasi serta memiliki rekam jejak ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

PEMBAHASAN

Autarkeia sebagai Teologi Kecukupan: Eksegesis Historis-Gramatikal 1 Timotius 6:6–10

Perikop 1 Timotius 6:6–10 dibuka dengan sebuah deklarasi paradoksal: "Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar" (TB-LAI). Kata yang diterje-

⁵ Luke Timothy Johnson, *The First and Second Letters to Timothy*, Anchor Bible 35A (New York: Doubleday, 2001), 296–298.

⁶ Gordon D. Fee, *1 and 2 Timothy, Titus*, *New International Biblical Commentary* (Peabody: Hendrickson, 1988), 143–145.

mahkan sebagai "ibadah" adalah εὐσέβεια (eusebeia), yang dalam tradisi Yunani-Romawi bukan semata-mata merujuk pada kesalehan ritual, melainkan mencakup orientasi seluruh hidup seseorang terhadap hal-hal yang bersifat ilahi dan tatanan kosmik. Dalam konteks Surat Pastoral, Paulus menggunakan kata ini untuk menggambarkan suatu pola kehidupan yang telah mengalami transformasi oleh Injil, sehingga seluruh domain eksistensi, termasuk domain ekonomi, tunduk pada nilai-nilai Kerajaan Allah.⁷

Kata kunci yang menjadi sumbu semantik dalam ayat ini adalah αὐτάρκεια (*autarkeia*), yang secara harfiah berarti "kepuasan diri" atau "kecukupan." Dalam tradisi filosofi Stoa, *autarkeia* sering dipahami sebagai kemampuan individu untuk menjadi mandiri sepenuhnya dari keadaan eksternal, sebuah autosufisiensi yang hampir solipsistik. Namun, Paulus memberikan konsep ini muatan yang sangat berbeda: *autarkeia* bukan kemandirian stoik yang menutup diri, melainkan suatu rasa cukup yang lahir dari kepercayaan bahwa Allah adalah penyedia yang mencukupkan. Fee menjelaskan bahwa *autarkeia* Pauline memiliki dimensi relasional dan komunal yang sama sekali asing bagi tradisi Stoa.⁸

Ayat-ayat 7 dan 8 memperkuat argumentasi ini dengan menyodorkan logika temporal-eksistensial: "Sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke luar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah." Kalimat ini bukan sekadar pepatah populer, melainkan argumen teologis yang serius tentang ontologi kepemilikan. Paulus menegaskan bahwa harta benda bersifat instrumental dan temporer, bukan konstitutif identitas seseorang. Towner mencatat bahwa ayat-ayat ini memiliki resonansi dengan tradisi Yahudi tentang telanjang lahir dan telanjang mati (Ayub 1:21; Pkh. 5:14), yang meletakkan relativitas harta dalam kerangka providensi ilahi.⁹

Klimaks teologis perikop ini terdapat pada ayat 9 dan 10, yang mengidentifikasi *philargyria* (cinta uang) sebagai "akar segala kejahatan." Formulasi ini sering disalahartikan sebagai penolakan total terhadap kekayaan material. Namun, Mounce secara tepat mengingatkan bahwa yang dikritik Paulus bukanlah kekayaan sebagai entitas, melainkan kecintaan terhadap kekayaan sebagai orientasi hati yang mensubordinasi segalanya, termasuk iman, relasi, dan integritas, kepada tujuan akumulasi finansial.¹⁰ Struktur retorika perikop ini juga patut mendapat perhatian. Paulus membangun argumennya dalam tiga gerakan: pertama, pernyataan positif tentang keuntungan rohani dari kecukupan (ay. 6); kedua, argumen dari sifat alamiah kepemilikan (ay. 7–8); dan ketiga, peringatan negatif tentang bahaya ketamakan (ay. 9–10). Gerakan triadik ini menunjukkan bahwa Paulus bukan hanya memberi nasihat moral, tetapi juga membangun epistemologi ekonomi, suatu cara berpikir tentang uang, kekayaan, dan nilai yang secara fundamental berbeda dari nilai-nilai masyarakat di sekitarnya.

Dalam konteks surat yang lebih luas, nasihat ini ditujukan tidak hanya kepada individu, tetapi juga kepada komunitas jemaat di Efesus yang bergumul dengan keutamaan

⁷ Fee, *1 and 2 Timothy, Titus*, 139-141

⁸ Johannes P. Louw dan Eugene A. Nida, *Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains*, vol. 1 (New York: United Bible Societies, 1988), 744–746.

⁹ Philip Towner, *The Letters to Timothy and Titus, New International Commentary on the New Testament* (Grand Rapids: Eerdmans, 2006), 401–403.

¹⁰ William Mounce, *Pastoral Epistles, Word Biblical Commentary 46* (Nashville: Thomas Nelson, 2000), 338–342.

kekayaan dalam konteks kota metropolitan Romawi. Efesus adalah pusat perdagangan yang makmur, dan jemaat Kristen di sana hidup di tengah budaya di mana kekayaan menjadi simbol berkat ilahi dan status sosial. Teks Pauline dengan demikian berfungsi sebagai kritik kultural sekaligus pembentukan identitas komunal yang melawan arus nilai-nilai dominan.¹¹

Dengan demikian, eksegesis ini menghasilkan temuan teologis yang signifikan: 1 Timotius 6:6–10 menawarkan bukan sekadar etika uang, melainkan teologi kecukupan yang memanggil komunitas Kristen untuk merepresentasikan nilai-nilai Kerajaan Allah dalam praktik ekonomi konkret mereka. *Autarkeia* bukan kemiskinan terpilih, bukan juga ketidakpedulian terhadap kebutuhan material, melainkan suatu reorientasi fundamental dari "memiliki lebih" menuju "menjadi dalam Kristus" sebagai sumber kecukupan tertinggi.¹²

Koinonia sebagai Infrastruktur Ekonomi: Rekonstruksi Sosio-Historis Praktik Ekonomi Gereja Perdana

Gereja perdana bukan hanya merupakan komunitas iman dan ibadah, tetapi juga komunitas ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang radikal berbeda dari sistem ekonomi Kekaisaran Romawi. Kisah Para Rasul 2:44–45 mencatat bahwa "semua orang yang telah percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing." Deskripsi ini bukan idealisme utopis, melainkan laporan historis tentang praktik komunal yang konkret.

Praktik koinonia ekonomi ini perlu dipahami dalam konteks stratifikasi sosial yang ekstrem di masyarakat Romawi pada abad pertama. Hengel mencatat bahwa dalam dunia Romawi, sekitar dua persen penduduk menguasai hampir seluruh kekayaan, sementara mayoritas populasi hidup dalam kondisi subsisten yang kronis. Komunitas Kristen, yang sebagian besar beranggotakan kelas menengah-bawah, pengrajin, pedagang kecil, dan budak yang dimerdekakan, menciptakan jaringan mutual aid yang memungkinkan kelangsungan hidup dan kohesi sosial. Winter menggambarkan orang-orang Kristen perdana sebagai "benefactor community" yang mengoperasikan ekonomi berbagi melampaui batas-batas kekerabatan biologis.¹³

Salah satu institusi ekonomi paling signifikan dalam gereja pada masa mula-mula adalah pemeliharaan janda (1Tim. 5:3–16). Daftar janda yang layak mendapat dukungan komunal merupakan bukti bahwa gereja mula-mula telah mengembangkan sistem kesejahteraan sosial yang terstruktur jauh sebelum negara modern mengambil alih fungsi tersebut. Lukas Vischer mencatat bahwa sistem persepuluhan yang diadopsi dari tradisi Yahudi, dikombinasikan dengan praktik persembahan sukarela, menciptakan dana

¹¹ Richard B. Hays, *The Moral Vision of the New Testament: Community, Cross, New Creation* (New York: HarperCollins, 1996), 464–465.

¹² Andreas J. Köstenberger dan Thomas R. Schreiner, eds., *Women in the Church: An Analysis and Application of 1 Timothy 2:9–15*, 3rd ed. (Wheaton: Crossway, 2016), 18–22.

¹³ Martin Hengel, *Property and Riches in the Early Church: Aspects of a Social History of Early Christianity* (Philadelphia: Fortress, 1974), 30–34; Bruce Winter, "Seek the Welfare of the City." *Theological Studies* 56, no. 4 (1995): 811.

komunal yang signifikan untuk fungsi-fungsi diakonal. Ini adalah proto-redistributif yang diinstitutionalkan dalam struktur eklesial.¹⁴

Kolekte Pauline untuk jemaat di Yerusalem (2Kor. 8–9; Rm. 15:25–27) merupakan ekspresi paling ambisius dari ekonomi koinonia lintas komunitas. Paulus bukan hanya mengorganisasi pengumpulan dana, tetapi secara teologis memaknainya sebagai perwujudan ekualitas, "supaya ada keseimbangan" (ἰσότης, 2 Kor. 8:14). Ini adalah satu-satunya tempat dalam surat-surat Paulus di mana keseimbangan ekonomi antarkomunitas dirumuskan sebagai kewajiban teologis. Armand Barus menegaskan bahwa kolekte ini merupakan tanda persatuan tubuh Kristus yang melampaui batas etnis dan geografis.¹⁵

Memasuki abad kedua dan ketiga, praktik-praktik ekonomi komunal ini semakin terstruktur dan terlembaga. Tertulianus dan Justinus Martir sama-sama bersaksi bahwa pengumpulan dana dilakukan secara rutin dalam pertemuan-pertemuan ibadah, dan hasilnya digunakan untuk memelihara orang miskin, janda, yatim piatu, narapidana, serta orang asing. González mencatat bahwa praktik ini menjadi salah satu faktor yang membuat kekristenan sangat menarik bagi kelas bawah Romawi: gereja menawarkan jaminan sosial yang konkret dan tidak tersedia dalam institusi publik.¹⁶

Penting untuk dipahami bahwa praktik-praktik ekonomi ini bukan sekadar filantropi individual, melainkan lahir dari suatu eklesiologi yang memahami gereja sebagai "tubuh Kristus" di mana penderitaan satu anggota menjadi penderitaan seluruh tubuh (1 Kor. 12:26). Collins dalam kajian seminalnya tentang diakonia menunjukkan bahwa pelayanan diakonal dalam gereja perdana selalu memiliki dimensi struktural: diaken bukan hanya pemberi bantuan ad hoc, melainkan administrator sistem ekonomi komunal yang terorganisir. Inilah yang membuat gereja perdana menjadi fenomena sosio-ekonomi yang unik dalam sejarah peradaban Mediterania.¹⁷

Dengan demikian, rekonstruksi sosio-historis ini menghasilkan gambaran yang jelas: gereja perdana mengoperasikan infrastruktur ekonomi berbasis teologi koinonia, membangun sistem redistribusi yang melampaui batas-batas kekerabatan dan etnis, serta menjadikan pelayanan kepada yang lemah sebagai ujian autentisitas iman komunal. Inilah yang dapat disebut sebagai "ekonomi Kerajaan Allah" dalam bentuknya yang paling konkret dan paling historis.¹⁸

Paradigma Ekonomi Kerajaan Allah: Konstruksi Teologis Integratif

Dari eksegesis 1 Timotius 6:6–10 dan rekonstruksi praktik ekonomi gereja perdana, dapat dikonstruksi paradigma yang penulis namakan "Ekonomi Kerajaan Allah." Paradigma ini bukan merupakan sistem ekonomi dalam pengertian teknis-ilmiah, melainkan suatu orientasi teologis komprehensif yang menentukan bagaimana komunitas beriman mengelola, mendistribusikan, dan memaknai sumber daya material mereka dalam terang nilai-

¹⁴ Lukas Vischer, ed., *Tithing in the Early Church* (Philadelphia: Fortress, 1966), 30–36; Francis LC. Rakotsoane, "Is tithing a justifiable development in the Christian church?" *HTS Theological Studies* 77, no. 4 (2021): 1–6.

¹⁵ Armand Barus, "Menembus Batas, Merangkul Kebinekaan." STT Amanat Agung, 2024. <https://repository.sttaa.ac.id/xmlui/handle/123456789/695>.

¹⁶ Justo L. González, *Faith and Wealth: A History of Early Christian Ideas on the Origin, Significance, and Use of Money* (San Francisco: Harper & Row, 1990), 88–101.

¹⁷ John N. Collins, *Diakonia: Re-interpreting the Ancient Sources* (Oxford: Oxford University Press, 1990), 195–210.

¹⁸ Collins, 245–252.

nilai Kerajaan Allah. Hays mendefinisikan implikasi etis-sosial dari teologi Pauline sebagai suatu proyek pembentukan komunitas kontra-kultural yang mewujudkan nilai-nilai alternatif dalam praktik nyata.¹⁹

Pilar pertama dari paradigma ini adalah teologi kecukupan sebagai kerangka epistemik alternatif bagi logika akumulasi. Dalam sistem ekonomi kapitalisme pasar, kecukupan adalah kondisi yang selalu relatif dan tidak pernah tercapai secara definitif; selalu ada lebih banyak yang dapat dimiliki. Sebaliknya, *autarkeia* Pauline mengubah parameter penilaian dari "seberapa banyak yang saya miliki" menjadi "seberapa setia saya pada panggilan Allah dalam kondisi yang ada." Ini bukan glorifikasi kemiskinan, melainkan rekonstruksi ontologi kepuasan.²⁰

Pilar kedua adalah redistribusi sebagai praktik teologis, bukan sekadar tindakan filantropis. Ketika gereja mengumpulkan dana dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan, tindakan ini bukan hanya tindakan sosial yang baik, melainkan proklamasi teologis bahwa dalam Kerajaan Allah, tidak ada seorang pun yang perlu kekurangan. Wheeler menegaskan bahwa dalam teologi Perjanjian Baru, kepemilikan harta selalu dimaknai dalam relasi, bukan sebagai hak absolut individual, melainkan sebagai penatalayanan yang bertanggung jawab kepada Allah dan komunitas.

Pilar ketiga adalah transparansi dan akuntabilitas sebagai nilai-nilai tata kelola. Gereja perdana, melalui institusi diaken, mengembangkan sistem akuntabilitas dalam pengelolaan dana komunal. Dalam paradigma ini, keuangan gereja bukan domain privat pemimpin, melainkan milik komunal yang memerlukan transparansi penuh. Bavinck, dalam refleksinya tentang gereja dan masyarakat, menegaskan bahwa gereja yang sehat secara teologis selalu mengelola keuangan dengan standar integritas yang melampaui standar dunia, karena harta yang dikelola merupakan titipan Allah.²¹

Pilar keempat adalah advokasi sebagai dimensi misioner. Ekonomi Kerajaan Allah tidak puas dengan redistribusi internal, melainkan mendorong komunitas untuk bersuara dan bertindak terhadap sistem-sistem yang secara struktural memproduksi ketidakadilan. Volf, dalam *Public Faith*-nya, membedakan antara gereja yang "menyerap" nilai-nilai dunia, gereja yang "memisahkan diri" dari dunia, dan gereja yang "terlibat" secara kritis dengan dunia demi transformasi dunia. Paradigma Ekonomi Kerajaan Allah memanggil gereja untuk berada dalam posisi keterlibatan yang kritis ini.²²

Pilar kelima adalah hospitalitas radikal sebagai praktik ekonomi yang konkret. Dalam gereja perdana, meja makan adalah arena teopolitik: perjamuan kasih (*agape*) bukan hanya ritual keagamaan, melainkan redistribusi makanan yang nyata bagi mereka yang lapar. Wright mencatat bahwa tradisi Israel tentang keadilan ekonomi, tahun Sabat, tahun Yobel, dan pelarangan riba terhadap sesama Israel semuanya menunjuk pada suatu

¹⁹ Richard B. Hays, *The Moral Vision of the New Testament: Community, Cross, New Creation* (New York: HarperCollins, 1996), 32–36.

²⁰ Sondra Wheeler, *Wealth as Peril and Obligation: The New Testament on Possessions* (Grand Rapids: Eerdmans, 1995), 120–134.

²¹ Herman Bavinck, *Reformed Dogmatics, vol. 4: Holy Spirit, Church, and New Creation*, ed. John Bolt (Grand Rapids: Baker Academic, 2008), 380–385.

²² Miroslav Volf, *A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good* (Grand Rapids: Brazos, 2011), 89–101.

tatanan di mana tubuh manusia yang nyata dijamin kebutuhan dasarnya dalam komunitas perjanjian.²³

Dengan demikian, paradigma Ekonomi Kerajaan Allah bukan sekadar etika ekonomi Kekristenan, melainkan suatu eklesiologi yang dihidupkan dalam praktik. Ia memanggil gereja untuk menjadi tanda dan foretaste dari tatanan Kerajaan yang akan digenapkan secara eskatologis, namun sudah harus diwujudkan—meski tidak sempurna—dalam komunitas-komunitas beriman di sini dan sekarang. Inilah yang dimaksud Paulus ketika ia berbicara tentang *autarkeia* sebagai keuntungan besar: bukan keuntungan finansial, melainkan keuntungan ontologis dari hidup yang selaras dengan realitas tertinggi.

Gereja sebagai Agen Keadilan Distributif: Relevansi Kontekstual bagi Indonesia Kontemporer

Ketimpangan ekonomi Indonesia kontemporer menawarkan konteks yang sangat relevan untuk menerapkan paradigma Ekonomi Kerajaan Allah yang telah dikonstruksi dalam pembahasan sebelumnya. Dalam konteks ini, gereja Indonesia berdiri di persimpangan yang kritis: ia memiliki basis komunal yang luas, jaringan kelembagaan yang mengakar, dan sumber daya manusia yang signifikan, namun sering kali gagal mentransformasikan potensi-potensi tersebut menjadi kontribusi nyata bagi keadilan distributif. Alvin Kristian mencatat bahwa gereja di Indonesia masih terjebak dalam dualisme antara spiritualitas pribadi yang sangat ditekankan di satu sisi dan keterlibatan publik yang minim di sisi lain.²⁴

Implementasi pertama dari paradigma ini dalam konteks Indonesia adalah reformasi tata kelola keuangan jemaat. Banyak gereja di Indonesia masih mengelola keuangan mereka tanpa standar transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Dalam terang eksegesis 1 Timotius 6 dan praktik gereja perdana, gereja dipanggil untuk mengadopsi standar pengelolaan keuangan yang tidak kalah dengan standar lembaga publik yang baik. Ini mencakup audit independen, laporan keuangan yang dapat diakses jemaat, serta mekanisme partisipasi komunal dalam pengambilan keputusan anggaran.²⁵

Implementasi kedua adalah pengembangan model diakonia struktural yang melampaui distribusi bantuan insidental. Mariani Febriana dalam kajiannya tentang gereja dan kemiskinan di Indonesia menyoroti bahwa mayoritas program diakonia gereja bersifat karitatif-reaktif: memberi bantuan ketika bencana terjadi atau kemiskinan terlihat, tanpa menyentuh akar-akar struktural yang memproduksi kemiskinan tersebut. Ekonomi Kerajaan Allah menuntut pergeseran dari diakonia karitatif menuju diakonia transformatif yang mengadvokasi perubahan kebijakan, mendorong pemberdayaan ekonomi komunitas, serta membangun sistem perlindungan sosial berbasis jemaat.²⁶

²³ Christopher J. H. Wright, *Old Testament Ethics for the People of God* (Downers Grove: InterVarsity, 2004), 148–172.

²⁴ Alvin Budiman Kristian, "Keadilan Sosial Dan Injil: Memahami Peran Gereja Dalam Era Ketidaksetaraan," *Didache: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 7, no. 1 (2025): 13-35.

²⁵ Musa Pardamean Napitupulu, "Ekonomi Solidaritas sebagai Praktik Resiliensi: Pembacaan Kisah Para Rasul 2: 44-47 dalam Membangun Ketahanan Umat di tengah Krisis," *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 7, no. 2 (2023): 177-186.

²⁶ Mariani Febriana, "Pietas Dan Caritas: Pelayanan Diakonia Sebagai Suatu Implementasi Kepedulian Sosial Gereja Untuk Menolong Meretas Angka Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Theologi Aletheia* 16, no. 7 (2014): 45-69.

Implementasi ketiga adalah pembentukan koperasi dan usaha ekonomi komunitas sebagai ekspresi konkret dari koinonia ekonomi. Markus Kusni dalam kajian mereka tentang ekonomi solidaritas gereja menunjukkan beberapa model gereja di Indonesia yang berhasil mengembangkan koperasi simpan pinjam, usaha bersama, serta program pengembangan keterampilan vokasional berbasis komunitas jemaat.²⁷ Model-model ini merupakan adaptasi kontekstual dari praktik ekonomi gereja perdana yang menciptakan jaringan mutual aid melintasi batas-batas kekerabatan biologis.

Implementasi keempat adalah keterlibatan gereja dalam advokasi kebijakan publik yang berkaitan dengan keadilan distributif. Ini mencakup advokasi untuk kebijakan perpajakan yang adil, perlindungan hak buruh, akses universal terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta reformasi agraria. Marbun mencatat bahwa spiritualitas yang otentik tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan sosial-politik yang konstruktif. Gereja yang setia pada mandat kenabian Injil tidak dapat tinggal diam ketika sistem-sistem yang ada secara sistematis mengeksklusi mereka yang lemah dari akses terhadap sumber daya dasar kehidupan.²⁸

Implementasi kelima adalah pembangunan jaringan antargereja untuk kolekte dan redistribusi lintas komunitas, mengikuti model kolekte Pauline. Dalam konteks Indonesia dengan kesenjangan besar antara gereja-gereja di perkotaan yang kaya dan gereja-gereja di pedalaman yang miskin, mekanisme redistribusi lintas komunitas yang terstruktur dapat menjadi ekspresi nyata dari kesatuan tubuh Kristus dan keadilan distributif. Oktapianus Pariantak menekankan bahwa rekonstruksi diakonia kontekstual di Indonesia harus mencakup dimensi struktural ini agar efektif dalam menjawab tantangan ketimpangan yang ada.²⁹

Akhirnya, implementasi paradigma ini memerlukan transformasi teologis dalam cara gereja memahami identitas dan misinya. Gereja yang benar-benar merangkul Injil tidak dapat membiarkan dirinya menjadi institusi yang eksklusif dan semata-mata berorientasi pada pertumbuhan numerik. Gereja dipanggil untuk menjadi ruang di mana yang tersisihkan menemukan tempat, di mana ekonomi berbagi menggantikan ekonomi penumpukan, dan di mana nilai-nilai Kerajaan Allah diwujudkan secara konkret dalam pengelolaan sumber daya bersama. Inilah kontribusi kenabian yang paling khas yang dapat diberikan gereja kepada Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa 1 Timotius 6:6–10 bukan sekadar nasihat etis-individual tentang bahaya uang, melainkan fondasi teologis bagi paradigma "Ekonomi Kerajaan Allah" yang komprehensif. Melalui eksegesis historis-gramatikal, penulis menemukan bahwa *autarkeia* Pauline menawarkan epistemologi kecukupan yang secara fundamental menantang logika akumulasi yang mendominasi wacana ekonomi kontemporer. Praktik ekonomi komunitas gereja perdana—*koinonia*, kolekte lintas komunitas,

²⁷ Markus Kusni, "Optimalisasi Pengelolaan Pelayanan dan Pemberdayaan Ekonomi dalam Konteks Gereja: Menuju Kesejahteraan Jemaat," *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 9, no. 1 (2025): 1-8.

²⁸ Agus Arda Setiawan Telaumbanua, Kristina Kaita Rui, Marchel Anthony Leiwakabessy, Rosita Tamu Ina, and Theodora Blitariyanti, "Reboisasi sebagai Ekspresi Spiritualitas: Inisiatif Iman Koperasi Bukit Asri Sentosa dalam Pemulihan Bukit Kendeng," *ELEOS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 1 (2025): 16-29.

²⁹ Oktapianus Pariantak, "Peran Gereja di dalam Krisis Kebangsaan: Studi Teologis dan Sosial dalam Konteks Indonesia," *Tarombo: Journal of Christian Theology, Education, and Ministry* 1, no. 1 (2026).

pemeliharaan yang lemah, dan diakonia terstruktur—merupakan implementasi historis dari paradigma ini yang membuktikan viabilitasnya. Bagi gereja Indonesia kontemporer, paradigma ini menuntut reformasi konkret: tata kelola keuangan yang transparan, *diakonia* yang transformatif, keterlibatan dalam advokasi kebijakan yang konstruktif, serta pembangunan jaringan ekonomi solidaritas antarkomunitas. Dengan demikian, gereja dapat menjadi agen keadilan distributif yang setia pada mandat Injil dan relevan dengan realitas ketimpangan di Indonesia.

REFERENSI

- Barus, Armand. "Menembus Batas, Merangkul Kebinekaan." STT Amanat Agung, 2024. <https://repository.sttaa.ac.id/xmlui/handle/123456789/695>.
- Bavinck, Herman. *Reformed Dogmatics*. Vol. 4: *Holy Spirit, Church, and New Creation*. Edited by John Bolt. Grand Rapids: Baker Academic, 2008.
- Collins, John N. *Diakonia: Re-interpreting the Ancient Sources*. Oxford: Oxford University Press, 1990.
- Febriana, Mariani. "Pietas Dan Caritas: Pelayanan Diakonia Sebagai Suatu Implementasi Kepedulian Sosial Gereja Untuk Menolong Meretas Angka Kemiskinan Di Indonesia." *Jurnal Theologi Aletheia* 16, no. 7 (2014): 45–69.
- Fee, Gordon D. *1 and 2 Timothy, Titus*. New International Biblical Commentary. Peabody: Hendrickson, 1988.
- González, Justo L. *Faith and Wealth: A History of Early Christian Ideas on the Origin, Significance, and Use of Money*. San Francisco: Harper & Row, 1990.
- Hays, Richard B. *The Moral Vision of the New Testament: Community, Cross, New Creation*. New York: HarperCollins, 1996.
- Hengel, Martin. *Property and Riches in the Early Church: Aspects of a Social History of Early Christianity*. Philadelphia: Fortress, 1974.
- Jatmiko, Bakhoh, and Desi Erlina Zega. "Etika Keuangan Hamba Tuhan: Kajian Eksegetikal Terhadap 1 Timotius 6: 3-10." *Integritas: Jurnal Teologi* 3, no. 2 (2021): 133–147.
- Johnson, Luke Timothy. *The First and Second Letters to Timothy*. Anchor Bible 35A. New York: Doubleday, 2001.
- Köstenberger, Andreas J., and Thomas R. Schreiner, eds. *Women in the Church: An Analysis and Application of 1 Timothy 2:9–15*. 3rd ed. Wheaton: Crossway, 2016.
- Kristian, Alvin Budiman. "Keadilan Sosial Dan Injil: Memahami Peran Gereja Dalam Era Ketidaksetaraan." *Didache: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 7, no. 1 (2025): 13–35.
- Kusni, Markus. "Optimalisasi Pengelolaan Pelayanan dan Pemberdayaan Ekonomi dalam Konteks Gereja: Menuju Kesejahteraan Jemaat." *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 9, no. 1 (2025): 1–8.
- Louw, Johannes P., and Eugene A. Nida. *Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains*. Vol. 1. New York: United Bible Societies, 1988.
- Mounce, William. *Pastoral Epistles*. Word Biblical Commentary 46. Nashville: Thomas Nelson, 2000.
- Napitupulu, Musa Pardamean. "Ekonomi Solidaritas sebagai Praktik Resiliensi: Pembacaan Kisah Para Rasul 2: 44-47 dalam Membangun Ketahanan Umat di tengah Krisis." *EPIGRAPHE: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 7, no. 2 (2023): 177–186.

- Pariantak, Oktapianus. "Peran Gereja di dalam Krisis Kebangsaan: Studi Teologis dan Sosial dalam Konteks Indonesia." *Tarombo: Journal of Christian Theology, Education, and Ministry* 1, no. 1 (2026).
- Rakotsoane, Francis L. C. "Is Tithing a Justifiable Development in the Christian Church?" *HTS Theological Studies* 77, no. 4 (2021): 1–6.
- Setiawan Telaumbanua, Agus Arda, Kristina Kaita Rui, Marchel Anthony Leiwakabessy, Rosita Tamu Ina, and Theodora Blitariyanti. "Reboisasi sebagai Ekspresi Spiritualitas: Inisiatif Iman Koperasi Bukit Asri Sentosa dalam Pemulihan Bukit Kendeng." *ELEOS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 1 (2025): 16–29.
- Sinurat, Yogi Hamonangan, and Robertus Septiandry. "Eksistensi Gereja Sinodal Sebagai Sakramen Keselamatan Universal." *Rajawali* (2023): 34–43.
- Towner, Philip. *The Letters to Timothy and Titus*. New International Commentary on the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 2006.
- Vischer, Lukas, ed. *Tithing in the Early Church*. Philadelphia: Fortress, 1966.
- Volf, Miroslav. *A Public Faith: How Followers of Christ Should Serve the Common Good*. Grand Rapids: Brazos, 2011.
- Wheeler, Sondra. *Wealth as Peril and Obligation: The New Testament on Possessions*. Grand Rapids: Eerdmans, 1995.
- Winter, Bruce. "Seek the Welfare of the City." *Theological Studies* 56, no. 4 (1995): 811.
- Wright, Christopher J. H. *Old Testament Ethics for the People of God*. Downers Grove: InterVarsity, 2004.